

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN
DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS
PENDERITA GANGGUAN JIWA
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:
CHINTYA ANGGRAINI
NPM. 1621020299

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN
DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATAS
PENDERITA GANGGUAN JIWA
(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)
dalam Ilmu Syariah

Oleh:
CHINTYA ANGGRAINI
NPM. 1621020299

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : M. Yasin Alarif, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Ciri konsep salah satunya adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa terkecuali untuk penderita gangguan jiwa sekalipun. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolaan stress. Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Berdasarkan data Riskesdas (2018) diketahui data penderita gangguan jiwa berat yang cukup banyak diwilayah indonesia dan sebagian besar tersebar pada masyarakat dibandingkan yang menjalin perawatan seperti di rumah sakit, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam penanggulangan gangguan jiwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa. 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah saat ini atas penderita gangguan jiwa. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa. Jenis penelitian adalah (*field research*) penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang datanya berupa wawancara, serta dokumentasi. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani penderita gangguan jiwa.

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya seperti yang tertera pada undang-undang kesehatan, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan memberikan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: jaminan pengaturan pelayanan kesehatan difasilitas pelayanan

kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mendapat hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

Kata kunci : Pemerintah, Fiqh siyasah, Hukum.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS Saya yang bertandatangan dibawah ini.

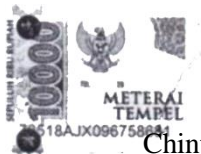
Nama : Chintya Anggraini
NPM : 1621020299
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*, adalah benar-benarkarya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 April 2021

Penulis,



Chintya Anggraini

NPM. 1621020299



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin, Sukrame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul

: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah).

Nama

: Chintya Anggraini

NPM

: 1621020299

Program Studi

: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas

: Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

M. Yasin Alarif, S.H., M.H

NIP. 197012282000031002

NIP. 2005019401

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarama Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh Nama: **CHINTYA ANGGRAINI**, NPM: 1621020299, Program Studi: **HUKUM TATA NEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari Jum'at / Tanggal 11 Juni 2021 :

TIM DEWAN PENGUJI:

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I., M.Sy. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : M. Yasin Alarif, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Q.S.An-Nissa ayat :59)¹

¹ Departemen Agama Islam RI.(Q.S.Annisa ayat 59)

PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Alm. Suhardi Beni Wijaya (Papa tersayang), beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku.
2. Mini Wanti (Mama tersayang), beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah malaikat tanpa sayap.
3. Vivian Dwi Yolanda kakak satu-satunya yang ku cintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini .
4. Teman-teman seperjuangku di angkatan 16 khususnya jurusan Hukum Tata Negara terima kasih atas kegilaan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
5. Para dosen dan staff di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Chintya Anggraini lahir di Kota Metro, pada tanggal 10 April 1998. Anak kedua dari dua saudara dari pasangan bapak Suhardi Beni Wijaya dan ibu Mini Wanti. Penulis mengawali pendidikan di SDN 06 Bandar Jaya Lampung Tengah 2004-2010, kemudian dilanjutkan pada SMP PGRI 1 Poncowati 2010-2013, dilanjutkan sekolah SMAN 1 Seputih Agung 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 10 April 2021
Yang Menyatakan,

Chintya Anggraini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. selaku yang menjalankan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Yasin Alarif, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen, tim penguji munaqasyah dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

6. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
7. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan Aamiin.

Bandar Lampung, 10 April 2021
Penulis

Chintya Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
I. Metode Penelitian	12

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	15
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	17
C. Hubungan Negara dengan Warga Negara dalam Perfektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah	20
1. Pengertian Pemerintah	23
2. Karakteristik Pemimpin dalam Hadis.....	25
3. Konsep Dan Kewenangan Pemerintah Daerah ...	27
D. Gangguan Jiwa.....	29
1. Definisi Gangguan Jiwa	29
2. Kesehatan Mental dalam Pandangan Fiqh Siyasah.....	32

BAB III : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH ATAS PENDERITA GANGGUAN JIWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan.....	42
B. Penyajian data dan fakta penelitian	43
C. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dihadapi Penderita Gangguan Jiwa	46
D. Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa	49
E. Kendala Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa.....	53

BAB IV : ANALISA DATA

A. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Penderita Gangguan Jiwa untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan.....	57
B. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa.....	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa” (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)**. Kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) dan sebagainya untuk mengetahui yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu Tata Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan.²
3. Gangguan Jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderita dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Mereka yang mengalami kondisi ini dikenal dengan sebutan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).³
4. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.⁴

¹Makimuddin, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga (Bandung:2006),32.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

³Penjelasan ODGJ (On-Line), Tersedia Di: <https://www.halodoc.com>(27 January 2020)

⁴Adi Wijaya Rendi, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Gramedia Pustaka,2018),3.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantara nya adalah sebagai berikut

1. Alasan Obyektif

Permasalahan dalam penelitian ini menarik untuk dibahas karena dilihat dari fenomena yang ada pemerintah belum menjalankan peran nya sesuai undang-undang yang telah ditetapkan karena masih banyak terlihat penderita gangguan jiwa yang terlantar yang belum diperhatikan.

2. Alasan Subyektif

- a. Penelitian ini menarik untuk di bahas dalam bentuk skripsi, khususnya di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*).
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*).
- c. Literatur dan Informasi yang berkaitan dengan topik tersebut tersedia sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa.

C. Latar Belakang Masalah

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dikemukakan bahwa Pembangunan Nasional diarahkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.⁵

Salah satu aspek yang wajib di realisasikan juga yaitu kesehatan, kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan merupakan hal yang penting dalam melakukan kegiatan sehari-hari, serta terdapat aturan hukum mengenai kesehatan. Menurut

⁵Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Rineka, 2017),113.

perkembangan hukum internasional Hak Asasi Manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.

Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu komponen kesehatan yang sangat penting yaitu tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.⁶

Gangguan Jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (*distress*) dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan aktivitasnya sehari-hari.⁷

Belakangan ini masih banyak pula terlihat orang yang mengalami penyakit gangguan jiwa yang masih banyak berkeliaran dijalanan. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyatakan, sangat diperlukan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Lampung menyusul banyaknya kasus gangguan jiwa di RSJ Daerah kurungan nyawa, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Khususnya di

⁶Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*, (Jakarta: Lakpesdam PBNU: 2016), 23.

⁷Rafael Lisinus, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis: 2020),175.

Lampung ini perlu adanya tambahan perhatian dari APBD terutama fasilitasnya. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban.⁸

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (*years lived with disability*). Depresi sendiri merupakan peringkat ke-8 penyebab beban utama akibat penyakit berdasarkan DALY'S (*disability-adjusted life year*). Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 tahun (*the global burden of disease, 2010*).⁹ Hal ini perlu diantisipasi, mengingat WHO mengestimasi depresi Indonesia akan menjadi peringkat ke-2 penyebab beban akibat penyakit di dunia (*global*) setelah jantung pada tahun 2020, dan menjadi peringkat pertama pada tahun 2030.¹⁰

Namun demikian kesenjangan pengobatan (*treatment gap*) antara masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar (>90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa mendapatkan pengobatan.

Islam tidak mewajibkan penderita gangguan jiwa untuk melakukan solat karena hilang akalunya maka jika sholat tidak tahu apa yang dibacanya bahkan bersuci saja tidak bisa dan bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Apabila terdapat penderita gangguan jiwa melakukan kejahatan atau melakukan yang dapat melukai orang lain maka tidak ada alasan untuk menistakannya apalagi menyakitinya. Serahkan saja kepada pihak berwenang, dengan tanpa melakukan perlakuan kasar dan merendhaknya.

⁸Pembinaa ODGJ diProvinsi Lampung” (On-Line) Tersedia di: [Http://Dinkes.Lampungprov.Go.Id/Profil-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Lampung/](http://Dinkes.Lampungprov.Go.Id/Profil-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Lampung/) (24 Juli 2020).

⁹Pembinaan ODGJ Diprovinsi Lampung” (On-Line) Tersedia Di: [Http://Dinkes.Lampungprov.Go.Id/Profil-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Lampung/](http://Dinkes.Lampungprov.Go.Id/Profil-Dinas-Kesehatan-Provinsi-Lampung/) (24 Juli 2020).

¹⁰*Disability-Adjusted Life Year*(On-Line) Tersedia Di: [Http://Hostmaster.Lampungprov.Go.Id/Lampung-Sehat-Berjaya](http://Hostmaster.Lampungprov.Go.Id/Lampung-Sehat-Berjaya)(24 Juli 2020).

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara jelas dalam QS An-Nisa:58 (16-18):

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹¹

(Qs. An-Nisa: 58 (16-18).

Dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kepada seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan bagi para pemimpin senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam syaria Islam. Sebagai contoh fakir miskin dan anak terlantar yang memiliki hak dalam kesejahteraan sosial yang sudah di atur dalam peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah keadilan yang telah diatur oleh Allah dalam Syaria-Nya.

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), 201.

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan manusia serta merupakan kebutuhan dasar dalam mempertahankan kehidupannya, oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal, dan bertanggung jawab atas kesehatannya, kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹²

Mengenai Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan” dan Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 17 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Maka seharusnya negara juga memperhatikan manusia yang mengidap penyakit Gangguan Jiwa sekalipun, karena mereka juga termasuk makhluk sosial yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan pasal 147 dan 149 yang berbunyi : Adapun Pasal 147 menyatakan bahwa:

- (1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - (2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
 - (3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹³
- Sedangkan Pasal 149 berbunyi

- (1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan.

¹²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹³Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, dan mengganggu ketertiban atau keamanan umum.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (4) Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.¹⁴

Fungsi kepala negara yang posisinya sebagai khalifah adalah membawa suatu perubahan sejalan dengan sistem negara demokratis dan modern yang ada. Fungsi dan posisi sebagai khalifah atau imam dalam konteks keilmuan adalah pemilik otoritas tertinggi dari pemerintah negara. Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang jelas (nyata), berdasarkan pada norma hukum islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.¹⁵

Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini sudah semestinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara sebagaimana dibahas dalam pembahasan *siyash dusturiyyah* yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warga negara maupun hak-hak warga negara yang biasanya membahas persoalan peraturan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah

¹⁴Ibid, 35.

¹⁵Isriawaty, Fheriyal S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HaKatas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *JurnalLegal Opiniom*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2015).

wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa melalui peraturan pemerintah atau instansi berterkait berdasarkan analisis fikih siyasah dan didukung dengan menggali informasi dari masyarakat sekitar.

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dan dikaji lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada "*Analisis Fiqh Siyasah* terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)?
2. Bagaimana analisis fikh siyasah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah).
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyasah* terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah).

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 177.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa berdasarkan undang-undang yang ada.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha malacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Penelitian pertama yaitu penelitian milik Sri Endarlina dari Universitas Lampung yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu”. Kesimpulan dalam penelitian Sri Endarlina yaitu dalam upaya perlindungan terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah penderita gangguan jiwa dari daerah kabupaten pringsewu belum ada peraturan daerah yang secara khusus

mengatur tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan penderita gangguan jiwa seperti dinas sosial yang akan membantu untuk merehabilitasi penderita gangguan jiwa kemudian terkait kesehatan petugas kesehatan akan datang ke TKP untuk kasus jiwa yang terdeteksi, penertiban terhadap penderita gangguan jiwa dan penganggaran untuk rehabilitasi. Dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai pemerintah daerah yang bersangkutan dalam pemenuhan hakpenderita gangguan jiwa di kabupaten pringsewu telah berperan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa.¹⁷

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Suska Riau milik Tio Prasetyo yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017”. Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu Tanggung jawab pemerintah kabupaten kampar pada kecamatan koto kampar hulu terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, yaitu melaksanakan advokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah. Namun, dikecamatan koto kampar hulu hal ini tidak berjalan dengan sesuai denganketentuan tersebut. Pemerintah kabupaten kampar kurang memperhatikankesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, baik dalam memberikanadvokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau maupun melakukan kunjungan rumah atau layananrumah sehingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tersebut tidak

¹⁷ Sri Endarlina, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Lampung, 2016.

terjalankan dengan baik.

Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten kampar dalam tanggung jawab pada kecamatan koto kampar hulu dalam penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa adalah kurangnya advokasi dan sosialisasi, kurangnya pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan tidak efektifnya pelayan kunjungan rumah dan layanan harian.¹⁸

Pada penelitian yang ketiga diteliti oleh Anshari Rijaldi Saptadjaya dari Universitas Pasundan, judul penelitiannya yaitu “Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam menangani orang dengan gangguan jiwa sudah terlaksana semaksimal mungkin namun terus bertambah banyak nya penderita gangguan jiwa dimasyarakat dikarenakan beberapa faktor yang seharusnya lebih dievaluasi.¹⁹

Dari ketiga hasil penelitian diatas kurang lebihnya sama dengan kesimpulan dari penelitian yang saya teliti tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas hak-hak penderita gangguan jiwa yang seharusnya mereka dapat dan dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang perhatian pemerintah terhadap penderita gangguan jiwa disini, kurang memaksimalkan fasilitas dan pelayanan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2006 Tentang Kesehatan khususnya yang tercantum pada pasal 147 dan 149 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa maupun Peraturan Daerah yang berkaitan.

¹⁸ Anshari Rijaldi Saptadjaya, *Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Bandung 2018.

¹⁹ Tio Prasetyo, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Riau, 2019.

Perbedaan dari penelitian yang saya teliti dengan peneliti lain yaitu disini penelitian yang saya lakukan menggunakan perfektivitas fiqih siyasah meskipun yang dikaji fokus kepada undang-undang kesehatannya, dan tempat penelitian yang saya teliti di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah , Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yang berupa wawancara (*interview*) untuk mendapatkan informasi terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada didalam fenomena tertentu.²¹ Dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari:

²⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumi, 1986), 33.

²¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna melakukan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam hal ini data primer diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Jadi data primer penelitian ini berupa hasil observasi, hasil wawancara, serta hasil dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya didapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literature buku-buku, jurnal, skripsi, dan media yang berkaitan dengan masalah penelitian.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden di lapangan (lokasi). Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam, wawancara dilakukan dengan Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.

²² Amirudin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴ Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi terkait dengan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak penderita gangguan jiwa. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita gangguan jiwa.

²⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *FiqhSiyasah*

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud *Fiqh Siyasah*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *Al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *Al-Siyasi* yang artinya adalah mengatur.²⁵

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).²⁶ Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh- sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* juga dapat disebut sebagai hukum islam, karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

Secara *etimologis* (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “Mengatur, mengurus, mengemudikan memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.²⁷ Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* memiliki kata sinonim dengan kata *dabbara* yang berarti juga mengatur, memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*), dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).

²⁵Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), H.21.

²⁶Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, H.23.

²⁷*Ibid.*, H.24

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:²⁸*Pertama*, Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. *Ketiga*, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang di berikan kepadanya.³⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³¹ Melihat kedua unsur tersebut, menurut H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik. Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.³² Akan tetapi, jika dilihat dari

²⁸Imam Amrusi Jailani, Dkk.,*Hukum Tata Negara Islam*(Surabaya: IAIN Press, 2011)H.7.

²⁹Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*,H.26.

³⁰Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta: UI Press, 1991), H.3

³¹Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), H.28

³²Wirjono Prodjodikromo, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, (Bandung:

segi fungsinya, Fiqh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.

Apabila digabungkan kedua kata fiqhdan Al-Siyasi maka fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama siyasah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti:

1. Menurut Imam Al-Bujairimi, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.³³
2. Menurut *Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait*, atau Lembaga Kementrian, *fiqh siyasah* adalah memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.³⁴
3. Menurut Imam Ibn Abidin *fiqh siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun diakhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para *sultan* (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.³⁵

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu,

Eresco, 1971),

³³Sulaiman Bin Muhammad Al-Bujarimi, Hasyiah Al-Bujarima Ala Al-Manaj (Bulaq: Mushthafa Al-Babial-Halabi, T.T), Vol.2 H.178

³⁴Wuzarat Al-Awqaf Wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah Bi Al-Kuwait, Al-Mausuat Al-Fiqiyyah, (Kuwait, Wuzaratal-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, T.T) Vol.25, H.295.

³⁵IbnAbidin, Radd Al-Muhtar' Ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1987), Vol.3, H.147

masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁶ Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³⁷

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang dan ada juga yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:³⁸

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
5. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat *fiqh siyasah* adalah membuat Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khali'f membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:³⁹

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Dauliyyah*
3. *Siyasah Maliyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasah al-Shar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

³⁶Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), 30.

³⁷Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³⁹Ibid, 48.

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiegy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. *Siyasah Maliyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).
4. *Siyasah Qadhaliyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
5. *Siyasah Idariyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
8. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaliyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- 3 *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Hubungan Negara dengan Warga Negara dalam Perfektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁰

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

⁴¹H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁴²

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Secara fungsional, dewan perwakilan umat yang pada gilirannya disebut *ahl al-hall wa al 'aqd* telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di Madinah. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan landasan filosofis sistem pemerintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini tampak ketika Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah, menghadapi persoalan yang bersifat duniawi dan menyangkut kepentingan umat yang mengharuskan melibatkan para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meskipun secara kelembagaan dewan tersebut tidak teroganisir dan tidak terstruktur, namun keberadaan mereka sangat penting dalam pemerintahan Islam yang selalu diajak bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi masalah yang tidak ada petunjuknya dalam al-Qur'an.⁴³ Sedangkan keanggotaan mereka tidak melalui pemilihan secara seremonial, tetapi melalui seleksi alam. Mereka adalah para sahabat yang dipercaya oleh umat sebagai wakil mereka yang selalu diajak

⁴²Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 157-158.

⁴³Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 63.

untuk bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW.⁴⁴

Karena Islam merupakan gerakan ideologis, maka fenomena yang melekat pada gerakan tersebut adalah bahwa orang-orang yang pertama ikut dalam gerakan tersebut dan orang-orang yang berjasa atas gerakan yang dilancarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam, dianggap sebagai sahabat sejati dan sekaligus sebagai penasihat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemilihan ini tidak melalui secara formal atau melalui pemungutan suara, tetapi secara alami melalui ujian praktek dan pengorbanan mereka terhadap gerakan Islam.⁴⁵

Jadi Hubungan *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan rakyat (hubungan negara dengan warga negara). Kekuasaan legislatif menjalankan tugas siyasah syar'iyahnya yang dilaksanakan oleh *ahl al-hall wa al 'aqd* untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat islam demi kemaslahatan umat islam, sesuai dengan ajaran islam.⁴⁶

1. Pengertian Pemerintah

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

⁴⁴Ibid, 65.

⁴⁵Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 62.

⁴⁶Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), 187-188.

⁴⁷Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), 11.

Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸

Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.⁴⁹ C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.⁵⁰ Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam system pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turutserta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh

⁴⁸Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁹Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), 28.

pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.⁵¹

2. Karakteristik Pemimpin Dalam Hadis.

Rasulullah SAW memimpin umatnya dengan baik, maka sifat-sifat kepemimpinan beliau dijadikan acuan, khususnya bagi umat Islam. Diantara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai berikut:

a. Jujur Dan Tidak Menipu

Nabi Muhammad SAW melaknat pemimpin yang dipercaya untuk mengurus urusan umat, lalu ia malah menipu atau menyengsarakan mereka, sebagaimana dalam sabdanya:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ.

"Ya Allah siapa saja yang diberi kekuasaan untuk mengurus umatku lalu ia menyengsarakan mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang diberi kekuasaan lalu ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia." (HR.Muslim no. 1828)

b. Adil Dan Amanah

Islam menempatkan pemimpin yang adil dan amanah dalam derajat manusia yang tertinggi, yang memperoleh berbagai penghargaan dan kehormatan. Diantaranya ia termasuk kelompok pertama yang dinaungi Allah SWT diantara 7 kelompok utama yang dinaungi-Nya pada Hari Kiamat kelak ia

⁵¹Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah* Cetakan Ke-3, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 77.

pun akan berada di atas mimbar dan cahaya nanti di Hari Kiamat (HR.Muslim). Dan pemimpin yang demikianlah yang akan senantiasa dicintai dan didoakan rakyatnya karena kebijaksanaannya memimpin rakyatnya (HR. Muslim).

c. Tidak Wajib Taat Pada Pemimpin Yang Memerintahkan Maksiat

Dalam Islam pemimpin yang memiliki sifat-sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berhak dan wajib ditaati. Syarat taat pada pemimpin pada ayat tersebut adalah tergantung (*mu'allaq*) pada apakah ia taat pada Allah SWT dan Rasulullah SAW atau tidak, dimana cirinya adalah ia senantiasa kembali kepada Allah SWT dan Rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat atau pun perselisihan dan bukan pemimpin yang memiliki sifat sebaliknya, jika ia memiliki sifat sebaliknya, maka tidak wajib sama sekali untuk didengar dan ditaati.

d. Tidak Ada Batasan Ras/Kebangsaan

Tentang siapa pemimpin itu, Islam tidak membatasi ia dari ras dan kelompok apapun, asal mengikuti dan menegakkan syariat maka wajib ditaati, sekalipun ia adalah seorang yang berkulit sangat hitam yang kepalanya bagaikan kismis (saking hitamnya) (HR.Bukhari). Kendatipun demikian, ada ulama yang mengatakan bahwa lebih utama seandainya memilih pemimpin disesuaikan dengan suku/kebangsaan rakyat yang dipimpinnya. Hal ini semata-mata dengan pertimbangan psikologis maupun sosiologis, karena pemimpin yang berasal dari ras atau suku yang sama dengan rakyat yang akan dipimpinnya, cenderung lebih cepat dan mudah untuk melakukan proses adaptasi.

e. Pemimpin Wajib Memilih Bawahan Yang Jujur

Seorang pemimpin yang adil tentunya akan memilih pembantu-pembantu, wakil-wakil dan menteri-menteri yang adil pula. Tidak mungkin seorang yang baik (tanpa keterpaksaan) akan mengangkat atau memilih wakil dan menteri yang merupakan para musuh Allah SWT, seperti para koruptor, kaum oportunistis apalagi para pengkhianat.

Dasar pijakan yang dipakai adalah surat Al Mumtahanah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ
مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي
وَإِتِّعَاءَ مَّرْصَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus”. (QS Al-Mumtahanah :1)

3. Konsep dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti:

- a) Hal wewenang
- b) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang mengandung arti:

- a) Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁵²

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum

⁵²Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), 143.

Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵³

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam pasal 3 dikatakan bahwa pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:⁵⁴

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan

⁵³SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.

⁵⁴Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.⁵⁵

D. Gangguan Jiwa

1. Definisi Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.⁵⁶

Definisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi.⁵⁷

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yang berada dirumah sakit jiwa maupun balai pengobatan jiwa sangatlah beraneka ragam. Salah satu jenis gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit jiwa adalah gangguan psikotes. Gangguan psikotes adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya ketidakmampuan seseorang

⁵⁵C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83.

⁵⁶Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 9.

⁵⁷Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), 10.

dalam menilai realitas.⁵⁸ Gangguan psikotes dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Gangguan Skizofrenia

Skizofrenia memiliki ciri-ciri diantaranya pengunduran diri atau kurangnya perhatian terhadap kenyataan. Simtom-simtom yang sangat umum pada penderita skizofrenia meliputi delusi, halusinasi dan disorganisasi proses pikiran.

Delusi adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak rasional yang melekat pada seseorang sehingga tidak mungkin lagi berubah. Adapun halusinasi adalah pengungkapan seseorang tentang kenyataan secara salah dan sama sekali tidak tepat, mendengar, mencium atau melihat segala sesuatunya yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan disorganisasi proses pikiran adalah pikiran-pikiran penderita skizofrenia yang diungkapkan tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan sama sekali tidak mengandung arti kalau pikiran-pikiran tersebut disatukan.⁵⁹

b. Gangguan Bipolar

Gangguan Bipolar disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh gangguan ini dibagi menjadi tiga tipe yakni, tipe manik, tipe depresif dan tipe campuran. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe manik adalah kondisi individu yang tidak merasa bingung, cemas atau mengalami depresi melainkan merasa bahagia, gembira dan tidak memikirkan masalah yang ada sehingga dia kelihatan meriah serta berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan.
- 2) Tipe depresif adalah kondisi individu yang sangat berlawanan dengan tipe manik dimana tipe depresif ini seseorang merasa sangat depresi, tidak responsif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menunggu lama sebelum menjawab.

⁵⁸Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*, (Jakarta: Purna Bhakti, 2001), 38.

⁵⁹Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 79.

- 3) Tipe campuran yang artinya gambaran-gambaran yang simtomnya adalah manik dan depresif tercampur dan berubah-ubah dalam jangka waktu beberapa hari.

Ciri-ciri pada penderita gangguan jiwa adalah skizofrenia adalah:

- a. Individu mengalami konflik batin seperti cemas, acuh tak acuh, iri hati, rasa tidak aman, kehilangan harga diri, agresif dan kepercayaan diri.
- b. Disorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus seperti khayalan yang menakutkan, aktivitas berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, khayalan dirinya paling super, tidak memiliki kesadaran hidup dengan orang lain.
- c. Gangguan emosional dan intelektual yang parah dan serius seperti persepsi yang dari penglihatan, khayalan yang tidak benar, emosi yang tidak tepat dan kepribadian terpecah.⁶⁰

Adanya gangguan jiwa pada seorang pasien dapat menimbulkan kondisi antara lain:⁶¹

- a. Gangguan aktivitas hidup sehari-hari

Adanya gangguan jiwa pada seseorang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti kemampuan untuk merawat diri seperti mandi, berpakaian, menggosok gigi atau berkurangnya kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti tidak mau makan, minum, buang air kecil serta diam dengan sedikit gerakan. Apabila kondisi dibiarkan berlanjut, maka akhirnya juga dapat menimbulkan penyakit fisik seperti kelaparan dan kurang gizi, sakit infeksi saluran pencernaan dan pernafasan serta adanya penyakit kulit atau penyakit lainnya.

- b. Gangguan hubungan interpersonal

Disamping berkurangnya kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seorang pasien kadang mengalami penurunan kemampuan melakukan hubungan (komunikasi) dengan orang lain. Pasien mungkin

⁶⁰Lilik Djuari, *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, (Surabaya: Airlangga, 2005), 11.

⁶¹Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 50.

tidak mau bicara, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau menghindar dan memberontak ketika didekati orang lain. Disamping itu pasien tidak mau bicara dengan terang-terangan apa yang difikirkannya.

2. Kesehatan Mental dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Konsep kesehatan mental atau *al-tibb al-ruhani* pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zayd Ahmed ibnu Sahl al-Balkhi (850-934). Dalam kitabnya berjudul *Masalih al-Abdanwa al-Anfus* (Makanan untuk Tubuh dan Jiwa). Ia biasa menggunakan istilah *Tibb al-Qalb* untuk menjelaskan kesehatan mental. Menurut *al-Balkhi*, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. Sedangkan, ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya.⁶²

Kesehatan mental manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, bakat, keturunan dan sebagainya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar diri seseorang seperti lingkungan, keluarga. Faktor luar lain yang berpengaruh seperti hukum, politik, sosial budaya, agama, pekerjaan dan sebagainya. Faktor eksternal yang baik dapat menjaga mental sehat seseorang, namun faktor eksternal yang buruk/tidak baik dapat berpotensi menimbulkan mental tidak sehat.

Di dalam pandangan Islam, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (*biologic*), intelektual (*rasio/cognitive*), *emosional (affective)* dan spiritual (agama) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.

⁶²Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 43.

Makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (*vertikal*), dan sesama manusia (*horisontal*) dan lingkungan alam.⁶³

Orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat disebut majnun atau orang gila, disebabkan karena dia tidak menggunakan akal. Yang dipikirkan hanyalah dunia fana, yang akan binasa dan yang akan kita tinggalkan ini, mengapa harus diutamakan atas akhirat yang kekal abadi yang disana manusia akan hidup selama-lamanya: apakah sengsara atau menderita atautkah senang dan bahagia. Orang yang tidak taat kepada Allah juga merupakan bagian dari orang yang mengutamakan dunia diatas akhirat dan termasuk orang gila juga. Hak Asasi Manusia didalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakannya hanya prestasi ketakwaannya.

Orang gila adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau orang yang sakit ingatan lantaran terhadap gangguan pada urat sarafnya. Dan biasanya, jika kita berbicara tentang orang gila, maka yang terlintas dipikiran kita adalah keadaan seseorang yang tidak terurus, tidak mandi dan berpakaian yang lusuh serta robek, dan bahkan ada yang tidak memakai sehelai benangpun atau telanjang bulat. Suka mengoceh atau meracau sesuka hatinya bahkan suka mengamuk sampai menyakiti orang lain serta berbagai macam keadaan tindakan yang tidak normal lainnya. Namun, demikian ada juga orang gila yang bertolak belakang dengan keadaan diatas atau dengan kata lain orang yang terganggu jiwanya tetapi tetap tampil dalam keadaan yang layaknya orang-orang normal. Menurut Abu Zahra bahwa banyak faktor dan kondisi yang membuat seseorang menjadi gila diantaranya ada orang gila yang diantara angan-angan atau cita-

⁶³Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Integrasi Untuk Aksi*, Cetakan VI, (Jakarta: Mizan, 1994), 78.

citanya tidak tercapai. Ada juga yang karena kehilangan sesuatu yang sangat dicintainya misalnya kekasih hati, harta benda, jabatan, dan juga oleh sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi, dalam pandangan agama sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang terganggu jiwanya oleh beberapa faktor atau keadaan yang telah diterangkan diatas tidaklah disebut sebagai orang gila. Orang-orang semacam itu hanya disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang sedang terkena musibah dari Allah SWT. Dan secara hukum mereka termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari melaksanakan kewajiban syariat seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kecuali pada suatu ketika mereka telah sembuh atau kembali kekeadaan normal dari keadaan gila tersebut. Atau dengan kata lain tidak ada dosa atas diri mereka jika melanggar perintah dan ketentuan dari Allah SWT, sampai mereka sembuh dari penyakitnya.

Hak Asasi Manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan yang artinya Islam memandang manusia sama atau setara dan yang membedakan ialah hanya prestasi ketakwaannya.

Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad SAW sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan.⁶⁴

Dalam paradigma al-Qur'an, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang kesehatan, baik itu dari segi fisik,

⁶⁴Muh. Haras Rasyid, *Konsep Pendidikan Islam Dalam Maqashid Al-Syari'ah*. Vol. 1, Nomor 2, Januari 2015, 4.

kejiwaan, sosial dan kerohanian. Ayat-ayat ini terdiri dari dua bagian, yakni:

Pertama; Konsep-konsep yang merujuk kepada pengertian normatif yang khusus, doktrin-doktrin etik. Dalam bagian pertama ini, kita mengenal banyak sekali konsep mengenai kesehatan, baik yang bersifat abstrak maupun yang konkret. Konsep yang abstrak di antaranya adalah konsep kondisi jiwa (*psikologis*), perasaan (emosi), akal dan lain sebagainya. Sementara konsep yang konkret mengenai pola kepribadian manusia (*personality*), seperti pola kepribadian yang beriman, pola kepribadian munafik, dan pola kepribadian kafir.

Kedua; Ayat-ayat yang berisi tentang sejarah dan amsal-amsal (perumpamaan). Seperti kisah di dalam mengenai kesabaran Nabi Ayyub dalam menghadapi ujian yang di timpakan oleh Allah berupa penyakit.

Kisah ini tertuang dalam QS. Al-Anbiya (21) ayat 83-84 berikut ini:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang". Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah".(QS. Al-Anbiya : 83-84).⁶⁵

Menurut Muhammad Mahmud, ada sembilan ciri atau karakteristik mental yang sehat, yakni:

- a) Kemapanan (*al-sakinah*), ketenangan (*ath-thuma'ninah*) dan rileks (*ar-rahah*) batin dalam menjalankan kewajiban, baik terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan.

⁶⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

- b) Memadai (*al-kifayah*) dalam beraktivitas).
- c) Menerima keadaan dirinya dan keadaan orang lain.
- d) Adanya kemampuan untuk menjaga diri.
- e) Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga, sosial, maupun agama.
- f) Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahanyang diperbuat.
- g) Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi.
- h) Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.
- i) Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (*al-farh* atau *al-surur*) dan kebahagiaan (*al-sa'adah*) dan menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.

Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Peningkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan.

Dari berbagai kasus yang ada justru banyak penderita kejiwaan yang disembuhkan dengan pendekatan agama. Hal ini membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang ber-Tuhan dan akan kembali ke-Tuhan pada suatu saat. Al-Quran berfungsi sebagai *Asy-Syifa* atau obat untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun rohani. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan tentang kesehatan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan dzikir (mengingat) Allah. Rasa taqwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih.

Pandangan islam tentang penyakit jiwa sering diidentikkan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela (*Akhlakul Mazmumah*), seperti sifat tamak, iri hati, arogan, emosional, dan seterusnya. Hasan Muhammad as-Syarqawi

dalam kitabnya *Nahw 'Ilmiah Nafsi* membagi penyakit jiwa dalam sembilan bagian, yaitu: pamer (*Riya*), marah (*al-ghadhab*), lalai dan lupa (*al-ghaflah wan nisyah*), was-was (*al-was-wasah*), frustrasi (*al-ya's*), rakus (*tama'*), terperdaya (*al-ghurur*), sombong (*al-ujub*), dengki dan iri hati (*al-hasd wal hiqd*). Beberapa sifat tercela diatas ada relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental (*mental hygiene*) sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia (*psychoses*).⁶⁶

Didalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita Negara republik Indonesia, sudah seharusnya pemerintah menetapkan undang-undang terkait kesehatan jiwa.

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-Undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-Undang Kesehatan jiwa kembali di tetapkan melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Adapun di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

- a. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.

⁶⁶As-Syarqawi, *Nahwa 'Ilm An-Nafsi Al-Islami* (2011: Jakarta), 111.

- b. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
- c. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- d. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kemudian disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “*Upaya Kesehatan Jiwa berasaskan: Keadilan, Perikemanusiaan, Manfaat, Transparansi, Akuntabilitas, Komprehensif, Pelindungan, Nondiskriminasi*”.⁶⁷

Selanjutnya dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 3 terdapat upaya kesehatan jiwa yang bertujuan:⁶⁸

- a. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;

⁶⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁶⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

- b. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;
- c. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- d. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;
- e. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- f. Meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 4

- (1) Upaya Kesehatan Jiwa dilakukan melalui kegiatan: Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif.
- (2) Upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.⁶⁹

⁶⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Jl. Ho Muchtar Gn. Sugih,, Komering Agung, Gunung Sugih, Komering Agung, Kec. Gn. Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34161. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.⁷⁰

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah telah beberapa kali terjadi perubahan nama dinas, ini disebabkan karena adanya perubahan Nomenklatur yang semula pada tahun 2009 bernama Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemudian pada tahun 2017 berubah menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dan pada Tahun 2018 telah terjadi perubahan Nomenklatur menjadi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan saat ini.⁷¹

Tugas Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang Sosial berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, dan tugas pembantuan. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah mempunyai fungsi : Perumusan Kebijakan teknis di bidang sosial. Penyelenggaraan sebagai urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati. Pelayanan administratif.⁷²

⁷⁰Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

⁷¹Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

⁷²Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah

Visi

Terwujudnya kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah Yang Mandiri dan Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan fasilitas pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui kelembagaan.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Pengertian tanggung jawab adalah bentuk kesanggupan seseorang untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan kehidupannya. Tanggung jawab adalah kunci dari keseimbangan hidup. Dijelaskan oleh Wiyoto (2001), tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Sementara Mudjiono (2012) menegaskan tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menafsirkan arti tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung

segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.

Ditarik dalam hasil penelitian yang penulis dapat dilihat pada data kualitatif dan wawancara dengan beberapa sampel pegawai dinas sosial lampung tengah kesimpulannya peran serta tanggung jawab pemerintah khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya.

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian

Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kartegori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Hal tersebut didukung pula oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan difasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum”.⁷³

Dari pernyataan Pasal 149 ayat (2) tersebut dapat kita ketahui bahwa pengobatan dan perawatan wajib diberikan kepada penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Dalam pasal tersebut diperjelas pula bahwa yang melakukan pengobatan dan perawatan salah satunya adalah pemerintah daerah.

Landasan hukum terkait pemenuhan hak penderita gangguan jiwa juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang

⁷³Baihaqi, *Psikiatri dan Gangguan - Gangguan* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 43.

memperkuat pernyataan yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 149 ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81 menyatakan bahwa⁷⁴:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
 - a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya

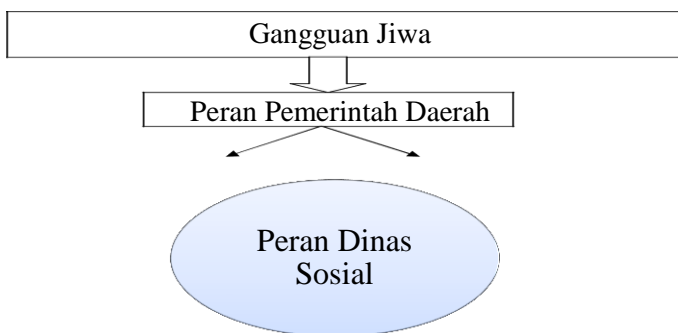
Bunyi dari pasal tersebut mendukung pasal 149 ayat (2) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan adanya pasal-pasal yang telah disebutkan dengan jelas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa, hak yang dimaksud tersebut adalah hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi guna memperoleh kesembuhan seutuhnya agar mereka dapat menjadi manusia produktif secara sosial dan ekonomis. Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita gangguan jiwa adalah rehabilitasi sosial.⁷⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial “rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”. Berdasarkan pada Pasal 81 Undang-Undang

⁷⁴Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

⁷⁵Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa rehabilitasi dilakukan untuk penderita gangguan jiwa yang tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu, dan tidak diketahui keluarganya.hal tersebut berarti apabila di suatu daerah terdapat penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum maka pemerintah daerah harus menanganinya meskipun tidak diketahui siapa keluarga dari penderita.⁷⁶ Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita



1. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 149 Ayat (2)

2. Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81

1. Penertiban penderita gangguan jiwa yang berkeliaran, terlantar dan menggelandang
2. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa

⁷⁶Dedy Spriady & Solihin, Dadang. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 78.

3. Pemerintah daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa

C. Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dihadapi Penderita Gangguan Jiwa

Kelompok orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia sama sekali belum dimasukkan dalam kelompok sasaran yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia. Padahal sebetulnya kelompok ini bila dilihat lebih lanjut bisa dimasukkan dalam jajaran kelompok rentan (*vulnerable groups*) sebagaimana kelompok perempuan, anak, lanjut usia, dan pekerja migran.⁷⁷

Di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di berbagai negara lain, ODGJ sering kali mengalami diskriminasi oleh keluarga, masyarakat sekeliling, media, maupun oleh negara. Model diskriminasi yang dialami oleh ODGJ adalah secara berlapis-lapis. Ketika seorang diketahui sebagai ODGJ maka dia akan didiskriminasi oleh keluarganya. Dalam banyak kasus keluarga kemudian mengasingkannya. Giliran berikutnya adalah diskriminasi oleh masyarakat sekeliling, media, dan kemudian negara.

Pelaku kekerasan secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu non-aktor negara (*non-state actors*) dan aktor negara (*state actors*). Untuk pelaku non-aktor negara antara lain adalah keluarga atau orang lain di rumah, tetangga, teman, perawat rumah sakit, mantri, dan dokter. Sedangkan untuk pelaku yang merupakan aktor negara adalah polisi, satuan polisi pamong praja (SatPol PP), petugas sosial (PNS), petugas lembaga pemasyarakatan, dan pejabat negara.⁷⁸

Bentuk yang dialami mulai dari pelecehan, stigmanisasi, perbedaan perlakuan (*unequal before the law*), pengusiran,

⁷⁷Kartono, Kartini. Patologi Sosial 3 : Gangguan-gangguan kejiwaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 16.

⁷⁸Ingram, I.M Dkk..Catatan Kuliah Psikiatri(Jakarta : EGC, 1993), 31.

penyerangan, perendahan martabat sebagai manusia, hingga pembunuhan.

Tindakan dan serangan yang ditujukan kepada ODGJ, tak bisa tidak dikarenakan memang karena adanya persepsi yang salah mengenai ODGJ. Kelompok ODGJ sering dipandang salah oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang menganut pandangan *fundamentalisme* agama dan juga masyarakat tradisional yang masih percaya pada hal-hal di luar nalar. Selain itu masyarakat kerap menggunakan ukuran norma (kenormalan), kebiasaan, atau pun hukum yang terbatas dan diskriminatif. Juga pendapat atau penafsiran yang lebih bertumpu pada pendapat individu.⁷⁹

Ada sejumlah orang yang menganggap ODGJ sebagai hal yang merupakan dosa atau kutukan Tuhan. Karena kutukan itulah ODGJ kemudian tersingkir dari dunia kemanusiaan. Ada pula yang menilai bahwa ODGJ merupakan orang dengan perilaku yang menyimpang yang melakukan sesuatu yang tak pada tempatnya, karena itulah mereka perlu diasingkan. Yang lain mengatakan bahwa kegilaan itu adalah sebuah penyakit sehingga muncul istilah “tidak waras”, “pikiran terganggu”, “otak terganggu”, “jiwa terganggu” dan lain-lain.

Secara hukum, seorang ODGJ juga dibedakan dan tak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum (*unequal before the law*). Karena itulah ODGJ sering mengalami diskriminasi dan tak dianggap sebagai individu di muka hukum. Ada pula yang berpendapat ODGJ sebagai kelompok orang yang berisiko yang diasosiasikan sebagai kelompok yang membahayakan atau meresahkan masyarakat.⁹

Adanya sejumlah penderitagangguan jiwa yang berkeliaran di jalan-jalan protokol. Mereka menjadi gelandangan tanpa ada pihak yang memperhatikan kondisi kesehatan mereka. Tidak diketahui pasti berapa jumlah mereka yang mengelandang. Fenomena gelandangan psikotik ini perlu ditangani dengan serius mengingat tidak jarang mereka menjadi obyek kekerasan fisik dan non-fisik. Di beberapa daerah, pemerintah daerah seringkali

⁷⁹*Ibid*, 36.

seringkali melakukan program pembersihan kota dengan memperlakukan gelandangan sebagaimana layak bukan manusia untuk kemudian memasukan mereka ketempat yang layak untuk ditinggali. Pihak yang seringkali melakukan pembersihan adalah Satpol PP.

Masih banyak pihak menganggap penderita gangguan jiwa sulit dipulihkan. Anggapan ini muncul karena belum banyak informasi mengenai mereka yang sudah pulih dan kembali ke tengah keluarga, masyarakat, dan beraktivitas sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Pada Penelitian ini dikemukakan beberapa penderita gangguan jiwa yang telah pulih secara kesehatan, beberapa diantara mereka masih mengalami diskriminasi sehingga sulit untuk hidup berdampingan dengan masyarakat.⁸⁰

Dibawah ini merupakan Tabel dari Dinas Sosial , merekap jumlah penderita gangguan jiwa yang terlantar :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDERITA GANGGUAN JIWA TERLANTAR		
		L	P	JML
1	Kalirejo	59	50	109
2	Bangun Rejo	28	15	43
3	Padang Ratu	42	43	85
4	Gunung Sugih	49	44	93
5	Trimurjo	18	17	35
6	Punggur	13	14	27
7	Terbanggi Besar	25	18	43
8	Seputih Raman	28	25	53
9	Rumbia	21	22	43
10	Seputih Banyak	35	23	58
11	Seputih Mataram	22	21	43
12	Seputih	38	30	68

⁸⁰Ardani, Tristiadi Adi Dkk. *Psikologi Klinis* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), 21.

	Surabaya			
13	Terusan Nunyai	6	6	12
14	Sendang Agung	37	47	84
15	Selagai Lingga	15	19	34
16	Pubian	33	27	60
17	Anak Tuha	31	24	55
18	Bumi Ratu Nuban	5	9	14
19	Bekri	22	26	48
20	Kota Gajah	14	17	31
21	Way Pengubuan	11	7	18
22	Seputih Agung	21	24	45
23	Bumi Nabung	11	12	23
24	Way Seputih	15	24	39
25	Bandar Mataram	49	39	88
26	Bandar Surabaya	17	19	36
27	Anak Ratu Aji	12	17	29
28	Putra Rumbia	12	17	29
TOTAL		689	656	1.345

D. Upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa

Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018, Kabupaten Lampung Tengah memiliki prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis sebesar 3 per 1.00, artinya setiap 100 penduduk Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 3 kasus penderita skizofrenia. Prevalensi gangguan emosional pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 mencapai 6,8%, angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebelumnya

sebesar 6%.⁸¹ Peningkatan masalah kesehatan jiwa ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Upaya bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. UU No. 18 Tahun 2014 ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.⁸²

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari pegawai dinas sosial kabupaten lampung tengah, diketahui bahwa Upaya promotif dan preventif termasuk dalam upaya pencegahan. Sedangkan upaya pengobatan, berupa upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Lampung Tengah telah menggunakan penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke lapangan mengidentifikasi penyandang gangguan jiwa di wilayahnya. Hal ini dipaparkan oleh Jeri Artono bahwa :

“Sejak tahun 2016 lalu, pemerintah daerah mulai menjadikan tindakan preventif sebagai fokus utamanya. Pemerintah daerah bersama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mulai memberikan edukasi mengenai cara menjadi ibu hamil yang tangguh, baik secara fisik maupun emosional sang ibu selama mengandung. Tidak hanya itu, disediakan pula konseling pra-nikah, edukasi parenting, hingga penyuluhan program yang berfokus kepada sekolah. Program yang berfokus pada sekolah dilakukan melalui guru konseling atau BK, umumnya

⁸¹Laporan Hasil Riskesdes Provinsi Lampung, 2018

⁸²Sosama. *Stop Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*. Jakarta: Primaga, 2014), 12.

konselin tersebut mengenai tindakan perundungan (bullying), seksual, dsb yang dilaporkan dengan rapor kesehatan.”⁸³

Menurut UU No. 18 tahun 2014, upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi operasional, serta mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.⁸⁴

Ibu Sovi Pratiwi menjelaskan lebih lanjut tentang narasumber dalam upaya Kuratif dan Rehabilitatif, mengatakan :

Dalam melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, Kementerian Kesehatan menysasar pada kemudahan akses agar masyarakat tidak hanya bisa ditangani di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Untuk saat ini, sudah ada beberapa yang memiliki psikolog klinis di puskesmas. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah psikolog klinis yang terdapat di tiap wilayah, Kemenkes berupaya melakukan pendelegasian wewenang kepada dokter dan tenaga perawat untuk melakukan pertolongan pertama kepada ODGJ. Dokter dan tenaga perawat diberikan sebuah workshop agar ilmu dari tenaga profesi rumah sakit jiwa dapat tersalurkan, mampu untuk menangani masalah kejiwaan, dan mempercepat proses intervensi sebelum terlambat.”⁸⁵

Untuk layanan kesehatan sekunder dilakukan oleh puskesmas menurut hasil temuan bahwa pukesmas di Kabupaten Lampung Tengah layanan kesehatan sudah baik, karena dalam penanganan kesehatan jiwa sudah mempunyai psikolog dan kader

⁸³Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

⁸⁴Undang-Undang No. 18 Tahun 2014

⁸⁵Sovi Pratiwi (Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

kesehatan jiwa pada masing-masing puskesmas dalam memonitor pasien gangguan jiwa di wilayahnya. Untuk pasien yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas akan dirujuk ke rumah sakit umum, dan rumah sakit jiwa untuk dilakukan pengobatan.⁸⁶

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik untuk layanan kesehatan bagi penyandang gangguan jiwa. Untuk masyarakat yang tidak mampu bisa melakukan kesehatan gratis melalui program Jamkesda dan Jamkesos dan sekarang menjadi BPJS/JKN. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Jeri Artono, bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah mengakomodasi persoalan kesehatan mental, seperti depresi. Namun, perihal percobaan bunuh diri untuk saat ini masih dalam tahap diperjuangkan agar dapat tercakup oleh BPJS.”⁸⁷

Penanganan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mencerminkan ada pendekatan HAM di dalam melakukan pemenuhan hak atas ekosob dan hak atas sipol. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sovi Pratiwi, bahwa :

Dalam penanganan orang yang terlantar yang psikotik yaitu melalui SatPol PP dalam penertiban gepeng psikotik yang selanjutnya psikotik ditampung di *camp assesment* atau tempat penampungan sementara /penilaian. Bila psikotik di rujuk ke rumah sakit jiwa yang kemudian bila sudah bisa mengenal diri dan biasa diajak bicara dan tidak mempunyai keluarga akan ditampung di Panti Sosial.”⁸⁸

Aksesibilitas informasi sudah terjalin baik antara *camp assesment*, panti sosial dan RSJ dalam penanganan upaya pemenuhan hak kesehatan khusus bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar dan tidak terlantar. Hal ini bisa terlihat dalam

⁸⁶Lampung Kesehatan, *Laporan Riset Kesehatan Dasar* 2018 (Riskesdas), Kementerian Kesehatan, Lampung 2018,11.

⁸⁷Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

⁸⁸Sovi Pratiwi (Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

bagan pola penanganan penyandang gangguan jiwa di Kabupaten Lampung Tengah.

Berkaca pada rumitnya permasalahan kesehatan mental, sudah sepantasnya masalah ini tidak hanya dibebankan pada satu institusi: Kemenkes. Tiap institusi termasuk institusi di bidang pendidikan harus turut andil dalam menyediakan program kesehatan jiwa, setidaknya pada tahap promotif dan kuratif. Sementara itu, meskipun masalah kesehatan telah diamanatkan sebagai urusan daerah, sudah semestinya pemerintah pusat turut mendorong pemerataan program kesehatan yang memadai. Tidak hanya terfokus pada kesehatan fisik, melainkan turut mencakup kesehatan mental. Tambah keterangan dari ibu Sovi Pratiwi, mengatakan:

“Jadi, kalau kita ingin melaksanakan lagu Indonesia Raya “Pembangunan Jiwa” yang merata, itu tidak bisa dilepaskan menjadi tanggung jawab daerah saja, harus ada kendali pusat yang memberikan subsidi dan program agar merata ke tiap daerah,”⁸⁹

E. Kendala Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa.

Kendala upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa kondisi ini tidak lain karena pemerintah pusat juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah. Namun untuk penanganan orang yang terlantar orang dengan kejiwaan senantiasa dilakukan operasi penjarangan gelandangan oleh SatPol PP Kabupaten/Kota.

Layanan kesehatan jiwa masih tertinggal dibandingkan beberapa isu kesehatan lainnya. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya penderita gangguan jiwa untuk mengakses layanan

⁸⁹Sovi Pratiwi (Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

kesehatan jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jeri Artonotentang pembiayaan kesehatan, beliau mengatakan:

“Keberadaan rumah sakit jiwa pada umumnya tersedia di provinsi dan/atau kabupaten/kota Hal ini sangat menyulitkan penderitagangguan jiwa yang tinggal di pelosok daerah. Rumah sakit jiwa belum dapat memaksimalkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Dalam beberapa kasus juga dilaporkan adanya diskriminasi bagi penderitagangguan jiwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.Oleh karena itu, perlu dikedepankan dan patut dipertimbangkan lebih lanjut akan pentingnya pendirian poli kesehatan jiwa di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Hal ini merupakan terobosan dalam segi pendekatan khusus aksesibilitas informasi melalui sesama penderita gangguan jiwa diharapkan pendekatan dapat lebih efektif mengeliminasi stigma bahwa penderita gangguan jiwa bukan merupakan kutukan atau aib yang tidak bisa dipulihkan.”⁹⁰

Dalam upaya pemenuhan khusus layanan aksibilitas biaya perawatan kesehatan selain persoalan persepsi bahwa penderita gangguan jiwa merupakan kutukan atau aib, biaya perawatan menyebabkan penderita gangguan jiwa tidak dapat memeriksakan kesehatan jiwa layanan kesehatan yang tersedia seperti Rumah Sakit Jiwa. Faktor kemiskinan yang hampir dialami sebagian besar penderita gangguan jiwa menyebabkan tidak adanya prioritas dalam pengalokasian keuangan keluarga untuk memeriksakan kesehatan jiwa anggota keluarganya untuk memeriksa kesehatan jiwa anggota keluarganya yang menderitagangguan jiwa.⁹¹

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderitagangguan jiwa, ada dua hal yaitu Pertama, pembiayaan dalam perawatan umum dan pembelian obat-obatan. Biaya rumah sakit jiwa kenyataan sulit

⁹⁰Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

⁹¹Kementerian Kesehatan RI. *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 15.

untuk dijangkau oleh sebagian besar penderita gangguan jiwa terutama yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Hal ini menarik perhatian adalah program pemberian obat-obatan secara gratis kepada penderita gangguan jiwa. Selain itu, penting untuk ditindaklanjuti ketiadaan kartu BPJS mengingat cukup banyak ditemukan penderita gangguan jiwa tidak memiliki kartu BPJS. Kedua, pembiayaan dalam rangka fisik menuju sarana kesehatan.

Belum tersedia poli kesehatan jiwa di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) menyebabkan banyak dari anggota keluarga untuk melakukan perawatan di rumah sakit jiwa, dikarenakan aksesibilitas yang ditempuh dari rumah ke Rumah Sakit Jiwa sangat jauh. Hal ini tidak lain karena jarak tempuh menuju rumah sakit jiwa yang sulit dijangkau. Penting untuk dicanangkan secara matang strategi pada sisi kebijakan perawatan kesehatan jiwa agar penyandang gangguan jiwa dapat memenuhi haknya tanpa diskriminasi, artinya seluruh individu dimanapun berada bisa terpenuhi hak atas kesehatan.

Untuk aksesibilitas jarak tempuh secara fisik fasilitas kesehatan jiwa. Tidak meratanya keberadaan rumah sakit jiwa yang dapat diakses, menjadi kendala dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa mengingat tidak sedikit penderita gangguan jiwa yang hidup dan tinggal di pelosok. Bagi layanan kesehatan jiwa yang paling mungkin untuk menghilangkan kesenjangan atas sulitnya keterjangkauan secara fisik layanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Untuk saat ini, perlu diprioritaskan ketersediaan kendaraan operasional sehingga dapat teratasi pasien yang sulit mengakses sarana kesehatan secara fisik.

Untuk aspek ketersediaan petugas kesehatan dan obat-obatan, masih berkurangnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa salah satu unsurnya tergambar pada minimnya ketersediaan tenaga kesehatan dan obat-obatan. Kondisi ini tidak terlepas dari masih belum dijadikan kesehatan jiwa sebagai persoalan kesehatan yang sangat prioritas. Sebagaimana fakta, data dan informasi, jumlah ODGJ di Indonesia semakin meningkat. Hal terlihat dengan tingginya prevalensi gangguan jiwa. Namun kondisi ini tidak dibarengi dengan tersedianya tenaga kesehatan. Perlu adanya suatu kebijakan di bidang kesehatan terkait ketersediaan tenaga

kesehatan jiwa. Sebagaimana Bapak Jeri Artono bahwa “Tidak tersedianya obat-obatan tidak lain karena belum adanya pendistribusian yang baik. Perlu ditindaklanjuti atas ketersediaan obat-obatan adalah alur pendistribusiannya dan pemerintah dari pusat dan daerah.”⁹²

Ditambahkan oleh Bapak Jeri Artono bahwa “Hal-hal gaib dan mistis masih memegang adat istiadat dan budaya, disatu sisi menjadikan pengembangan jati diri, Namun jika berkaitan dengan dengan kesehatan, terkadang ini menjadi kendala tersendiri bagi dunia medis. Ada kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah umumnya mempercayai pengobatan ke dukun sebagai sesuatu yang dianggap ampuh dan solusi.”⁹³

Persoalan lain terkait kesehatan adalah ketersediaan obat-obatan bagi penderitagangguan jiwa. Tidak sedikit kasus penderitagangguan jiwa yang sudah ditangani medis harus berhenti berobat karena ketersediaan obat habis. Sebagaimana diketahui, penderita gangguan jiwa tidak diperkenankan untuk absen untuk berobat. Untuk obat-obatan di rumah sakit jiwa yang berada di provinsi/kabupaten/kota kecenderungan selalu tersedia dibandingkan di puskesmas. Di daerah, ketersediaan obat-obatan konon bergantung pada pemesanan pihak lain layanan kesehatan ke dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

⁹²Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

⁹³Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap Penderita Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan.

Peran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang terlibat dalam penanganan penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan hak pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi adalah dinas sosial. Landasan hukum bahwa penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 149 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 81.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pasal yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa. Hal tersebut didukung pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang didalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap penderita gangguan jiwa. Sebelum penderita gangguan jiwa memperoleh perawatan dan pengobatan serta rehabilitasi maka terlebih dahulu dilakukan penertiban, kemudian dari penanganan yang dilakukan akan menghasilkan suatu kesimpulan apakah pemerintah daerah berperan atau tidak dalam pemenuhan hak penderita gangguan jiwa.

Definisi gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik,

frustrasi maupun depresi.⁹⁴

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari pegawai dinas sosial kabupaten lampung tengah, Sebagaimana mestinya dari hasil wawancara yang saya dapat yaitu kurang nya tersedianya obat-obatan tidak lain karena belum adanya pendistribusian yang baik. Perlu ditindaklanjuti atas ketersediaan obatan-obatan adalah alur pendistribusiannya dan pemerintah dari pusat dan daerah. Diketahui bahwa Upaya promotif dan preventif termasuk dalam upaya pencegahan yang dilakukan disana. Sedangkan upaya pengobatan, berupa upaya kuratif dan rehabilitatif.

Pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Lampung Tengah telah menggunakan penerapan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan menggunakan kader jiwa untuk turun ke lapangan mengidentifikasi penyandang gangguan jiwa di wilayahnya.

Teori Pemerintahan terdapat 2 teori yaitu *Local Self Goverment* dan *Local State Government*. Pemerintah daerah dalam bentuk *Local Self Government* berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu.

Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus

⁹⁴Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), Hlm.10

tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Negara.

Bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan undang-undang dibentuk pemerintahan daerah tertentu dan selanjutnya daerah tersebut disertai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan tertentu dan pada perkembangannya dapat dipecah atau dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu. Sebaliknya berdasarkan undang-undang daerah dimaksud dapat digabungkan dengan daerah lain atau bahkan dapat dihapuskan jika ternyata dalam perkembangannya daerah tersebut dipandang tidak mampu mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Bentuk *Local Self Government* itu diperlukan untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak mungkin ditangani secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan urusan pemerintahan ini akan lebih baik jika ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (*Local Self Government*).

Berbeda dengan fungsi prinsip pemerintahan *Local state government* adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah.

Tidak semua urusan pemerintah pusat itu dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.

Local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial merupakan suatu hal yang sama pentingnya dengan komunikasi fisik. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah itu ditentukan oleh seberapa jauh hubungan *face to face* antara pejabat pemerintah pemberi pelayanan dengan masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk memperoleh respons dari anggota masyarakat secara langsung.

Pentingnya pemerintahan wilayah pada hakikatnya untuk memaksimalkan respek masyarakat terhadap program pemerintah. Sebagai konsekuensinya tugas pemerintahan wilayah hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif, yaitu:

- a. bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan;
- b. pelimpahan kekuasaan ditujukan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah;
- c. kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
- d. pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan

rumah tangga sendiri.

Maka dari itu bentuk pemerintahan daerah *Local Self Government* merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adapun program/kegiatan aksi HAM yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terkait orang dengan gangguan jiwa. Adapun kendala upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa kondisi ini tidak lain karena pemerintah

pusat juga minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah.

B. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik (*biologic*), intelektual (*rasio/cognitive*), emosional (*affective*) dan agama (*spiritual*) yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Upaya Kesehatan Jiwa merupakan setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Hubungan antar Warga Negara dan Negara yaitu warga negara sebagai pendukung negara memiliki arti penting bagi negara. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang tinggal di wilayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan negara tersebut. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Negara tidak terkait oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Begitu sebaliknya negara lain juga tidak berhak menentukan atau turut campur dalam penentuan kewarganegaraan suatu negara. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 26 UUD 1945. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga

negara. Sedang Negara itu sendiri merupakan suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Maka dari itu harus lah adanya keseimbangan antar warga negara dan negara tersebut guna tercapainya timbal balik.

Kajian *Fiqh Siyasah* mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an. Para sahabat terdahulu menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan.

Tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁹⁵

Pada zaman sahabat orang penderita gangguan jiwa diberi tindakan dengan cara pembinaan keagamaan secara sederhana yakni merujuk pada suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan segenap kepercayaan kepada Tuhan serta dengan ajaran-ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Agama juga dapat dipahami sebagai ketetapan Tuhan yang dapat diterima oleh akal sehat sebagai pandangan hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan yang bersifat pribadi. Sedangkan keagamaan merujuk pada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tak bersifat pribadi. Penghayatan

⁹⁵Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*,H.26.

keagamaan melingkupi penghayatan agama, dengan kata lain bahwa keagamaan dapat dipandang sebagai suatu pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari agama. Pembinaan keagamaan dapat dipahami sebagai upaya membangun, memperbaiki dan mempertahankan keadaan diri seseorang dalam menghayati agama secara lebih mendalam.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.⁹⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting didalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur. Bentuk dari peraturan ini diatur dan masuk kedalam golongan *Fiqh Siyyasah Dusturiyyah* yaitu yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam *Fiqh Siyyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penderita gangguan jiwa. Namun semua itu belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak hak-hak bagi penderita gangguan jiwa yang belum terpenuhi, dengan kendala pemerintah daerah yang minim perhatian terhadap isu kesehatan jiwa. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan hampir tidak tersedia anggaran khusus yang memadai tentang kesehatan jiwa di pemerintah daerah, sehingga masih banyak penderita gangguan jiwa yang terlantar.

Permasalahan yang beraneka ragam bentuk dan jenisnya,

⁹⁶Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*(Jakarta: UI Press, 1991), H.3

yaitu menyeru kepada setiap individu , keharusan untuk melaksanakan Undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, menyeru untuk berbuat baik, melarang melakukan hal-hal yang cenderung tidak mendangkan keuntungan bagi orang banyak, kewajiban tersebut menjadi kewajiban individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan didalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan fakta-fakta pada temuan hasil penelitian. Secara umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pasal yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa. Sebelum penderita gangguan jiwa memperoleh perawatan dan pengobatan serta rehabilitasi maka terlebih dahulu dilakukan penertiban, kemudian dari penanganan. Dengan adanya hasil yang didapatkan disini peran dan tanggung jawab pemerintah sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara maksimal dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak penderita gangguan jiwa yang masih terlantar dijalanan. Dengan meningkatkan upaya layanan kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan juga menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa. Sudah seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan warga negaranya yang mengalami gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi mengenai mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah disini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Kajian *Fiqh Siyasah* mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum menjalankan

apa yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya. Apabila pemerintah tidak memperhatikan warga negaranya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang dzalim terhadap warga negaranya sendiri, dan semua pertanggungjawaban akan ditanya diakhiratkelak. Karena pemerintah tidak menjalankan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan (*Fiqh Siyasa Dustuiyyah*) yang tertulis saat ini pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah bisa lebih serius memperhatikan masalah ODGJ karena bagaimanapun mereka juga merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara.
2. Seharusnya sosialisasi terkait undang-undang kesehatan jiwa lebih ditingkatkan lagi, pasalnya temuan penulis dilapangan bahwa undang-undang ini kurang populer di masyarakat bahkan dalam lingkup pegawai dinas sosial tidak mengetahui sama sekali mengenai undang-undang ini meskipun program perlindungannya telah berjalan walau kurang efisien.
3. Sebaiknya kerja sama pemerintah baik itu pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait, kepolisian, serta masyarakat lebih ditingkatkan lagi demi terwujudnya perlindungan yang lebih baik lagi terhadap ODGJ.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Makimuddin, *Analisis Sosial*, Bandung :Yayasan Akatiga, 2006.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.

Adi Wijaya Rendi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka,2018.

Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Rineka, 2017.

Sri Palupi, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Berbasis Hak*, Jakarta: Lakpesdam PBNU: 2016.

Rafael Lisinus, *Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis: 2020).

Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART, 2004).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*, Jakarta: Purna Bhakti, 2001.

Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.

Baihaqi, *Psikiatri dan Gangguan – Gangguan*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Kartono, Kartini. Patologi Sosial 3 : *Gangguan-gangguan kejiwaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ingram, I.M Dkk.. *Catatan Kuliah Psikiatri*, Jakarta : EGC, 1993.

Ardani, Tristiadi Adi Dkk. *Psikologi Klinis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Sosama. *Stop Stigma dan Diskriminasi Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, Jakarta: Primaga, 2014.

Lampung Kesehatan, *Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018* (Riskesdas), Kementerian Kesehatan, Lampung 2018.

Sovi Pratiwi (Sub Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

Jeri Artono (Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, wawancara dengan penulis), Lampung Timur, 22 Februari 2021.

Sumber Internet :

Penjelasan ODGJ (On-Line), Tersedia Di: <https://www.halodoc.com> (27 January 2020)

Pembinaa ODGJ diProvinsi Lampung” (On-Line) Tersedia di: <http://dinkes.lampungprov.go.id/profil-dinas-kesehatan-provinsi-lampung/> (24 Juli 2020).

Disability-Adjusted Life Year(On-Line) Tersedia Di: <http://hostmaster.lampungprov.go.id/lampung-sehat-berjaya> (24 Juli 2020).

Sumber Jurnal &Skripsi :

Isriawaty, Fheriyal S. “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HaK atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” *Jurnal Legal Opiniom*, Vol. 3, No. 2, (Februari 2015).

Sri Endarlina, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Pringsewu*, Lampung, 2016.

Anshari Rijaldi Saptadjaya, *Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Bandung 2018.

Tio Prasetyo, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa*, Riau, 2019.

Sri Murniati dan Dwi Kasasih, “*Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*”, *Jurnal Kompetitif*, Vol.6 No.1. Januari-Juli 2017, diakses pada tanggal 27 Februari 2020

LAMPIRAN



ACC BAB I - V
07-04/2021

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH ATAS PENDERITA GANGGUAN JIWA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Acc dan Parent I
untuk S.H. hukum
2/4

CHINTYA ANGGRAINI

NPM. 1621020299

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukrame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1225/Un.16 / WR.1 / LT/ IV / 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP : 196201111994031001
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul:

**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab
Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
CHINTYA ANGGRAINI	1621020299	FS/SY

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 15 % dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 21 April 2021
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH
NIP. 196201111994031001

Ket:

1. Surat keterangan Cek Turnitin sah, dengan stempel asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Turnitin dan Lampirkan Hasil Cek Turnitin Ini di Bagian Lampiran Skripsi

"Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah atas Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Lampung T

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

1%

3

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

4

www.pustaka.ut.ac.id

Internet Source

1%

5

www.scribd.com

Internet Source

1%

6

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

1%

8

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

9	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
10	docplayer.info Internet Source	1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	1 %
12	id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	www.republika.co.id Internet Source	<1 %
14	alifudin0407.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to IAI KAPD Jawa Timur Student Paper	<1 %
16	andrisudwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	es.scribd.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
19	Submitted to Sunnyslope High School Student Paper	<1 %

www.economica.id

20	Internet Source	<1 %
21	dunia.pendidikan.co.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
23	www.viva.co.id Internet Source	<1 %
24	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
28	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
29	eprints.akakom.ac.id Internet Source	<1 %
30	issuu.com Internet Source	<1 %
31	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %